



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN I

PANGKALAN PSDKP BENOA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

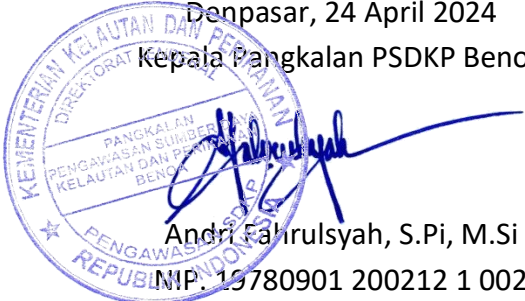
KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) pada Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, disamping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (Pangkalan PSDKP Benoa) pada Tahun 2024.

LKj Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Pangkalan PSDKP Benoa dalam kurun waktu Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Pangkalan PSDKP Benoa dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Denpasar, 24 April 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Benoa



Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Pangkalan PSDKP Benoa kepada Ditjen. PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Pangkalan PSDKP Benoa telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Benoa menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan, yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽²⁾ Terselenggaranya operasi armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas; ⁽⁸⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa pada triwulan I tahun 2024 sebesar 103,22%. Pada triwulan I tahun 2024 indikator kinerja yang dihitung sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja dari 25 indikator kinerja pada tahun 2024, 8 (delapan) indikator kinerja yang telah mencapai target dan 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target yaitu Indeks kinerja operasi speedboat pengawas dan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa TA. 2024 sebesar Rp. 37.252.236.000,00. Realisasi anggaran hingga 31 Maret 2024 sebesar Rp. 4.883.759.005,00 dengan persentase 13,11%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa	2
E. Sistematika Penyajian Laporan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024.....	4
B. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Benoa 2020-2024.....	7
C. Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan.....	9
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	13
A. Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2024	13
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	14
C. Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV PENUTUP.....	31
A. Kesimpulan	31
B. Rekomendasi	31
LAMPIRAN	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (Pangkalan PSDKP Benoa) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan SDKP Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Benoa telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Benoa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2024, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

- a. Banyaknya nelayan kapal ijin pusat yang tidak mengetahui bahwa kapal yang berada di bawah 12 mil laut adalah pelanggaran jalur penangkapan ikan;
- b. Cuaca buruk menyebabkan banyak kapal ijin pusat bergerak berlindung di bawah 12 mil laut sehingga menyebabkan banyaknya indikasi pelanggaran daerah atau jalur penangkapan ikan.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Masih banyaknya usaha pemanfaatan ruang laut yang belum mengetahui teknis perijinan pemanfaatan ruang laut;
- b. Unit usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum memiliki dokumen perijinan.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Benoa mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pangkalan PSDKP Benoa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Benoa membawahi 6 (enam) Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) yaitu sebagai berikut:

1. Satwas SDKP Lombok Timur;
2. Satwas SDKP Jemberana;
3. Satwas SDKP Banyuwangi;
4. Satwas SDKP Probolinggo;
5. Satwas SDKP Lamongan;
6. Satwas SDKP Surabaya.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Pangkalan PSDKP Benoa.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian Pangkalan PSDKP Benoa pada Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Benoa 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Merujuk kepada Rencana Strategis KKP dimana KKP telah merumuskan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, salah satunya diamanatkan kepada Ditjen PSDKP yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Selain tertuang dalam Renstra KKP, Ditjen PSDKP juga menjalankan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan untuk arah kebijakan Ditjen PSDKP yaitu:

1. Menindak tegas terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing;
2. Tegas terhadap nelayan lokal (KII) yang melanggar peraturan perundang-undangan;
3. Ditjen. PSDKP tidak melaksanakan fungsi pembinaan tetapi fungsi pengawasan/penegakan hukum;
4. Ditjen. PSDKP sebagai benteng KKP untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui

meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen. PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-1	Kesejahteraan Masyarakat KP Meningkat	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Kesejahteraan masyarakat KP dibentuk oleh aspek ekonomi dan aspek sosial-kelembagaan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP secara sosial dan kelembagaan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

B. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Bena 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Bena 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon III dan Eselon IV lingkup Pangkalan PSDKP Bena. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Secara ringkas substansi Renstra Pangkalan PSDKP Bena hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Pangkalan PSDKP Bena serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pangkalan PSDKP Bena, maka dirumuskan visi Pangkalan PSDKP Bena yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab lingkup Pangkalan PSDKP Bena menuju terwujudnya visi Direktorat Jenderal PSDKP”

Sejalan dengan visi Pangkalan PSDKP Bena, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Bena.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bena;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para

pemangku kepentingan kelautan dan perikanan lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa;

- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pangkalan PSDKP Benoa maka dirumuskan beberapa Tujuan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa yang dirumuskan dari Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas
- 2) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan
- 3) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan
- 4) Terselenggaranya pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas
- 5) Terselenggaranya pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

- 6) Terselenggaranya pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)
- 7) Terselenggaranya perawatan kapal pengawas
- 8) Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas
- 9) Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas
- 10) Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas
- 11) Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan
- 12) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan
- 13) Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal
- 14) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

C. Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2021-2024 berbasis ekonomi biru :

1. Penambahan luas Kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota;
3. Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan;
4. Pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pengelolaan sampah plastik di laut.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2021-2024 berbasis ekonomi biru, Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengawasi pengelolaan konservasi nasional Gili Matra;
2. Mengawal pelaksanaan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota di Pelabuhan dalam wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
3. Mengawasi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Turut serta dalam pelaksanaan kegiatan bulan cinta laut di Bali yang merupakan salah satu kegiatan pengelolaan sampah plastik di laut.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Sebagai upaya perbaikan perencanaan dari tahun sebelumnya, Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2024 telah menetapkan 8 sasaran kegiatan dan 25 Indikator Kinerja. Indikator Kinerja berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya operasi armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (persen)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa menggunakan penilaian mandiri Satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai)	75
		13	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	70
		15	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	82

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	84
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	80
		18	Nilai implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	21
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa (inovasi)	1
		20	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	80
		21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	94
		22	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	80
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	80
		24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	93,76
		25	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	82

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Pangkalan PSDKP Benoa dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2024

Dalam pengelolaan kinerja Pangkalan PSDKP Benoa telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa sebesar 103,22 %, yang diperoleh dari capaian indikator kinerja sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan I		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81	-	-	-
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91	91	92,22	101,34
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	91	86,67	95,24
4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	100	100	100	100
5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (persen)	100	-	-	-
6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100	-	-	-
7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100	100	100	100
8	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100	100	100	100
9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	-	-	-
10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	40	78,26	120
11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93	-	-	-
12	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju	75	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan I		
			Target	Realisasi	Capaian
	Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa menggunakan penilaian mandiri Satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai)				
13	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100	100	100	100
14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	70	-	-	-
15	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	82	-	-	-
16	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	84	-	-	-
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	80	80	37,5	46,88
18	Nilai implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	21	-	-	-
19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Benoa (inovasi)	1	-	-	-
20	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	80	80	90,6	113,25
21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	94	94	126,67	120
22	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	80	-	-	-
23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	80	-	-	-
24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	93,76	-	-	-
25	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	82	-	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2024, Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Kegiatan 1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan

Sasaran Kegiatan 1.2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : ¹⁾ Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks); 2) Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks); ³⁾ Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (persen);

1. Indikator Kinerja 2. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Capaian indikator "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas" pada triwulan I tahun 2024 sebesar 92,22 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 91. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Capaian indikator kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	87,6	96	109,59	91	92,22	101,34

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan I tahun 2024 realisasi Indeks kinerja operasi kapal pengawas adalah 92,22 dari yang ditargetkan sebesar 91. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada perhitungan indeks kapal pengawas terdapat perubahan target kapal perikanan yang diperiksa dari 2 kapal perikanan menjadi 3 kapal perikanan, sehingga meskipun jumlah jam operasi kapal pengawas dan jumlah kapal yang diperiksa pada triwulan I tahun 2024 lebih banyak capaian indeks lebih rendah dari triwulan I tahun 2023.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- Cakupan wilayah pengawasan;
- Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;

d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pelaksanaan operasi kapal pengawas di Pangkalan PSDKP Benoa yaitu Hiu 009 pada periode Januari sampai dengan Maret tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas Hiu 009 Tahun 2024

No	Periode dan Tanggal Operasi	Jumlah Hari Operasi	Jumlah Jam	Jumlah Diperiksa	Jumlah Melanggar
1	Periode I (9 -18 Maret 2024)	10	97,3	23 kapal perikanan dan 1 kapal keruk pasir (objek kelautan)	-
2	Periode II (25-26 Maret 2024)	2	34,4	3 kapal perikanan dan 1 kapal keruk pasir (objek kelautan)	1 kapal keruk (tidak mempunyai PKKPR)
Jumlah		12	131,7	28	1

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas yang telah dilaksanakan tersebut maka dengan pengukuran indeks menggunakan formulasi yang telah ditetapkan diperoleh capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas pada tahun 2024 yaitu 92,22.

Pencapaian kinerja Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas telah melebihi dari target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2024 yaitu 91. Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja kapal pengawas Hiu 009, dimana kapal pengawas Hiu 009 didukung oleh 11 awak kapal pengawas yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatannya masing-masing dalam tugasnya di Kapal Pengawas Hiu 009, dan kondisi kapal pengawas yang dalam keadaan baik (siap operasi). Selain itu keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” sebesar Rp. 4.225.019.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi Rp. 731.599.794,- atau 17,32%.

2. Indikator Kinerja 3. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Capaian indikator “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” pada tahun 2024 sebesar 86,67 dari target yang ditetapkan sebesar 91. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	87,6	90	102,74	91	86,67	95,24

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 realisasi Indeks kinerja operasi Speedboat pengawas adalah 86,67 dari yang ditargetkan sebesar 91. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 capaian indikator kinerja ini tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan formula penghitungan indikator kinerja. Sedangkan jumlah jam operasi dan kapal yang diperiksa tahun 2024 lebih tinggi.

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- Cakupan wilayah pengawasan;
- Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon *Illegal*, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pelaksanaan operasi speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Bena pada periode Januari sampai dengan Maret tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas Tahun 2024

No	Speedboat Pengawas	Jumlah Hari Operasi	Jumlah Jam	Jumlah Kapal Diperiksa	Jumlah Kapal Melanggar
1	Dolphin 028 (Banyuwangi)	3	14	8	-
2	Napoleon 007 (Bena)	10	62,65	30	-
3	Napoleon 023 (Lombok)	2	10,30	17	-
4	Napoleon 053 (Probolinggo)	5	33,40	19	-
5	Rubberboat (Bena)	-	-	-	-
6	Rubberboat (Jembrana)	-	-	-	-
Jumlah		20	120,35	74	-

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas tersebut maka dengan pengukuran indeks menggunakan formulasi yang telah ditetapkan diperoleh capaian indeks kinerja operasi speedboat pengawas pada tahun 2024 yaitu 86,67.

Pencapaian kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 91. Hal ini dikarenakan rubberboat Pangkalan PSDKP Benoa masih dalam tahap perbaikan sedangkan rubberboat Satwas SDKP Jembrana belum dapat beroperasi karena kurangnya SDM dan cuaca buruk.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” sebesar Rp. 971.990.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi Rp. 109.891.950,- atau 11,31%.

3. Indikator Kinerja 4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Capaian indikator “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas” pada triwulan I tahun 2024 sebesar 100 dari target sebesar 100. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023 karena pada tahun 2023 capaian indikator kinerja ini tidak dihitung pada triwulan I.

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%
Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	-	-	-	100	100	100

Pemenuhan logistik kapal pengawas meliputi pemenuhan kebutuhan BBM kapal pengawas, pemenuhan kebutuhan pelumas kapal pengawas, pemenuhan bahan makanan AKP, pemenuhan kebutuhan air bersih, pemenuhan kebutuhan alat pelayanan kapal pengawas (ATK dan bahan komputer) dan pemenuhan kebutuhan senjata api.

Pada tahun 2024 Pangkalan PSDKP Benoa telah memenuhi kebutuhan logistik kapal pengawas Hiu 009 untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Tercapainya indikator kinerja ini sesuai target karena dalam pemenuhan logistik pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Benoa telah direncanakan dengan baik dan dilakukan tepat waktu. Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja pemenuhan logistik antara lain adalah pengadaan suku cadang kapal pengawas hiu 009 dilakukan secara e-purchasing sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Matriks indeks pemenuhan logistik armada kapal pengawas Pangkalan PSDKP Benoa dapat dilihat pada lampiran.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas” sebesar Rp. 4.225.019.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi Rp. 731.599.794,- atau 17,32%.

Kegiatan 2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan.

4. Indikator Kinerja 7. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan" dengan capaian 100%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	-	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan I tahun 2024 realisasi nilai kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 100. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan terdiri dari :

- a. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha jenis ikan dilindungi;
- b. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan;
- c. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan ruang laut;
- d. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- e. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;

f. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Penentuan Nilai Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pencapaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah merupakan pencapaian dari pemeriksaan kegiatan pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

NO	Kegiatan	Triwulan I Tahun 2024	
		Jumlah Pelaku Usaha	Nilai
1	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	7	100
2	Pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan	5	100
3	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut	12	100
4	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	3	100
5	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional	6	100
6	Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	54	100
Jumlah		87	100

Pencapaian kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa telah sesuai dari target yang ditetapkan pada tahun 2024. Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan polsus PWP3K di Pangkalan PSDKP Benoa maupun di Satwas SDKP di bawah Pangkalan PSDKP Benoa. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dan pokmaswas serta sosialisasi kepada pelaku usaha kelautan melalui media sosial.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 975.300.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 79.889.380,- atau 8,19 %.

Kegiatan 3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Sasaran Kegiatan 5. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Pencapaian sasaran kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan" telah diidentifikasi dalam indikator kinerja "Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan".

5. Indikator Kinerja 8. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan" tahun 2024 adalah 100 dari target sebesar 100. Capaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	-	-	-	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan I tahun 2024 realisasi nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 100. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja.

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut :

Tabel 3.11. Penentuan Nilai Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pencapaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12. Pemeriksaan Kepatuhan Usaha Perikanan Pangkalan PSDKP Benoa

Kegiatan	Triwulan I Tahun 2024	
	Unit Usaha/kode proyek	Nilai Penyelesaian
Pemeriksaan pelaku usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan berbasis risiko	1	100
Pemeriksaan pelaku usaha pembudidayaan ikan berbasis risiko	2	100
Pemeriksaan pelaku usaha pengolahan ikan berbasis risiko	21	100
Pemeriksaan pemasaran dan distribusi hasil perikanan berbasis risiko	6	100
Pemeriksaan budidaya program Prioritas Nasional	3	100
Pemeriksaan pelaku usaha LKR	22	100
Total	55	100

Berdasarkan tabel di atas, berikut pencapaian masing-masing kegiatan pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan berdasarkan wilayah kerja di Pangkalan PSDKP Benoa :

Pencapaian kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa telah sesuai dari target yang ditetapkan pada tahun 2024. Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa maupun di Satwas, dimana pengawas perikanan yang tersebar di wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa berjumlah 47 orang. Keberhasilan pencapaian ini selain didukung dengan anggaran operasional dan sarana prasarana yang ada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa juga didukung dengan terjalinnya koordinasi yang baik Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 1.747.000.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 279.124.575,- atau 15,98%.

Kegiatan 4. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : ¹⁾ Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks) dan ²⁾ Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks).

6. Indikator Kinerja 10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)

Capaian indikator "Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan" pada triwulan I tahun 2024 sebesar 78,26 dari target yang ditetapkan 40. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%
Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	-	-	-	40	78,26	120

Berdasarkan tabel di atas, pada triwulan tahun 2024 realisasi indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan ingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 78,26 dari yang ditargetkan sebesar 80. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023 karena ini merupakan indikator kinerja baru.

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perhitungan indeks diperoleh dari jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa dibagi jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis pemantauan.

Pada tahun 2024 di Pangkalan PSDKP Benoa terdapat 46 dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan dan yang telah diperiksa sebanyak 36 orang/pelaku usaha. Sehingga diperoleh capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 78,26%. Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja pengawas perikanan dan PPNS di lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, dimana jumlah pengawas perikanan pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 47 orang dan PPNS berjumlah 20 orang. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung oleh kompetensi yang dimiliki PPNS Pangkalan PSDKP Benoa yang dapat menganalisa dengan baik terkait kasus-kasus yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa serta adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan” Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 156.500.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2024 belum ada realisasi.

Kegiatan 5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran Kegiatan 8. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”, Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 14 indikator kinerja yaitu : ⁽¹⁾ Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa menggunakan penilaian mandiri Satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai); ⁽²⁾ Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen) ⁽³⁾ Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (nilai); ⁽⁴⁾ Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks); ⁽⁵⁾ Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai); ⁽⁶⁾ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan

lingkup Pangkalan PSDKP Bena yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen); ⁽⁷⁾ Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Bena (nilai); ⁽⁸⁾ Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bena (inovasi); ⁽⁹⁾ Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Bena (indeks); ⁽¹⁰⁾ Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bena (persen); ⁽¹¹⁾ Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bena (persen); ⁽¹²⁾ Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bena (persen); ⁽¹³⁾ Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bena (nilai); ⁽¹⁴⁾ Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bena (nilai). Capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bena” disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14. Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Triwulan I Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bena (persen)	100	100	100
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bena yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	80	37,5	46,88
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Bena (indeks)	80	90,6	113,25
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bena (persen)	94	126,67	120

7. Indikator Kinerja 13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bena

Capaian indikator “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bena (persen)” pada tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Capaian pada triwulan I tahun 2024 sama apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%
Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100	100	100	100	100	100

Penilaian risiko dilakukan melalui form penilaian risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Dari form pemantauan risiko Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2024 memiliki 21 rencana pengendalian risiko dan 21 realisasi pengendalian risiko, sehingga capaian persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup PSDKP Benoa adalah 100%. Tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pendampingan penyusunan manajemen risiko oleh Setditjen PSDKP serta rapat internal Pangkalan PSDKP Benoa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian yang bersifat rutin, berkala dan dengan pendekatan manajemen risiko.

Alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)” sebesar Rp. 216.050.000,- dan sampai 31 Maret 2024 telah terealisasi Rp. 28.061.862,- atau 12,99%.

8. Indikator Kinerja 17. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pangkalan PSDKP Benoa berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 Maret 2024 (TW I periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Hingga 31 Maret 2024 6 (enam) rekomendasi telah ditindaklanjuti hingga tuntas dari 16 (enam belas) rekomendasi dalam LHP.

Capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023 karena pada tahun 2023 indikator kinerja ini tidak dihitung, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sampai dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	-	-	80	37,5	46,88

Capaian indikator kinerja pada triwulan I tahun 2024 diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan pada triwulan IV tahun 2023 yang berjumlah 16 rekomendasi dan sampai pada 31 Maret 2024 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dan disampaikan adalah 6 rekomendasi sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 37,5%, dan tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan oleh ada beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti namun belum disampaikan, selain itu juga karena kendala kegiatan ekspose yang belum dilakukan.

9. Indikator Kinerja 20. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Benoa adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Benoa. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Benoa, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa pada triwulan I tahun 2024 adalah 90,6 dan telah memenuhi target sebesar 80 dengan capaian 113,25%. Nilai tersebut diperoleh karena pelayanan yang diberikan terhadap pengguna layanan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pelayanan penerbitan SLO lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dilaksanakan pada beberapa satwas maupun wilker sebagai berikut :

1. Pangkalan PSDKP Benoa
2. Satwas SDKP Lombok Timur
3. Wilker SDKP Teluk Awang
4. Wilker SDKP Tanjung Luar
5. Wilker SDKP Sape
6. Satwas SDKP Jembrana
7. Satwas SDKP Banyuwangi
8. Wilker PP Masami
9. Wilker SDKP Tanjung Wangi
10. Satwas SDKP Probolinggo
11. Satwas SDKP Lamongan
12. Wilker SDKP Bulu
13. Wilker SDKP Gresik
14. Wilker SDKP Tuban

Tabel 3.17. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	80	88,77	110,96	80	90,6	113,25

Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena pelayanan yang diberikan seluruh wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sudah lebih dari periode sebelumnya, antara lain dalam hal hal persyaratan pelayanan dan prosedur pelayanan, dimana Pangkalan PSDKP Benoa selalu mendampingi dan memberikan sosialisasi pada para pengguna layanan terhadap aplikasi yang baru diterapkan. Pangkalan PSDKP Benoa selalu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para nelayan dan stakeholder.

Alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa” sebesar Rp. 72.430.000,- dan sampai 31 Maret 2024 belum ada realisasi.

10. Indikator Kinerja 21. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Capaian indikator kinerja “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa” pada tahun triwulan I 2024 adalah 126,67% yang diperoleh dari komponen keaktifan pada aplikasi *Collaboration Office*, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan. Pegawai yang wajib dinilai adalah Kepala unit kerja dan ketua tim kerja.

Tabel 3.18. Capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan I Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	92	85,19	92,60	94	126,67	120

Tercapainya indikator kinerja ini sesuai target didukung oleh data dan informasi yang disampaikan pada aplikasi *Collaboration Office* telah memenuhi kriteria dan mencakup kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan Pangkalan PSDKP Benoa. Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023, mengalami kenaikan.

Hal ini dikarenakan ketua tim kerja yang aktif mengunggah kegiatan yang dilaksanakan pada aplikasi *Collaboration Office* sehingga persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa mencapai target 120%.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp. 46.600.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2024 belum ada realisasi.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa TA. 2024 sebesar Rp. 37.252.236.000,-. Realisasi anggaran hingga 31 Maret 2024 sebesar Rp. 4.883.759.005,- dengan persentase 13,11%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2024 berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.64. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	17.414.727.000	1.040.200.437	5,97
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000	-	-
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	975.300.000	79.889.380	8,19
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.747.000.000	279.124.575	15,98
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	16.830.709.000	3.484.544.613	20,70
TOTAL		37.252.236.000	4.883.759.005	13,11

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa pada triwulan I tahun 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Capaian kinerja Pangkalan PSDKP pada triwulan I tahun 2024 Secara keseluruhan dinyatakan berhasil dengan nilai kinerja organisasi mencapai 103,22 % dengan realisasi anggaran sebesar 13,11 %.
3. Hasil capaian indikator kinerja pada triwulan I tahun 2024 yang diperjanjikan belum seluruhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan diantaranya yaitu indikator kinerja Indeks kinerja operasi speedboat pengawas dan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan. Pangkalan PSDKP Benoa akan terus meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Benoa untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekomendasi Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Triwulan I Tahun 2024

NO	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Operasi rubberboat pengawas	Rubberboat yang siap operasi	Perbaikan Rubberboat
2	Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan	Dokumen tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan	Mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi



LAMPIRAN